

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Andini dan Yusrawati (2015) kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Menurut Rahayu, dkk (2014) Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat dari kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Sedangkan menurut Sutrisno (2009) dalam Tua (2015) Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Menurut Yosefrinaldi (2013) dalam Soimah (2014) sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi yang sangat peting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut peneliti menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hutape dan Thoha (2008:8) dalam Andini (2015) mengungkapkan bahwa ada tiga indikator atau komponen yaitu :

- a. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan

tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi entitas.

- b. Ketrampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya ketrampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu atau kelompok.
- c. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Hutapea dan Nuriana, (2008:28) dalam Yuliyanti (2015) mengungkap indikator sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggungjawabnya dalam bekerja
- b. Memiliki kemampuan berkeativitas dalam bekerja
- c. Ada semangat kerja yang tinggi
- d. Memiliki kemampuan dalam perencanaan pengorganisasian

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komponen tersebut merupakan bagian kepribadian yang melekat pada seseorang dengan prilaku yang dapat diprediksi dan dapat digunakan dalam pekerjaannya.

2.1.1.3 Jenis - Jenis Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang didukung latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia yang berkompeten tersebut akan memahami logika akuntansi yang baik. (Windiastruti, 2013)

1. Pendidikan formal

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan menjadi indikator dalam derajat intelektual seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pengetahuan dan

intelektualitas. Dengan tingkat pendidikan yang memadai akan memudahkan seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan OPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan.

2. Pendidikan dan pelatihan

Program pendidikan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik.

Beberapa tujuan dari program pendidikan dan pelatihan pegawai sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan produktivitas kerja
- (b) Meningkatkan kecakapan manajerial pekerja
- (c) Meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu
- (d) Mengurangi tingkat kesalahan pegawai
- (e) Meningkatkan pelayanan yang baik dari karyawan untuk konsumen perusahaan dan atau organisasi
- (f) Menjaga moral yang baik
- (g) Meningkatkan karier pegawai

3. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja didalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator bahwa seseorang yang telah

memiliki kemampuan dalam suatu bidang, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas yang diberikan kepada pegawai.

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah OPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang akuntansi atau keuangan, karena dalam penyusunanya laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi keuangan beserta aturan-aturan penyusunan laporan keuangan daerah.

2.1.1.4 Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wati, dkk (2014) kompetensi sumber daya manusia ada menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu entitas. Dalam hal ini sumber daya manusia memiliki peran perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misinya. (Susilo, 2010)

Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggara tugas dan fungsi organisasi

dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan. Jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien, kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. (Wati, 2014)

Hutapea dan Thoha (2008:28) dalam Andini dan Yusrawati (2015) mengungkapkan komponen kompetensi sumber daya manusia yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, komponen tersebut dapat digunakan dalam penentuan tingkat kompetensi guna mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan, dan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, evaluasi kerja serta pengembangan sumber daya manusia.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka dalam penyusunan laporan keuangan dapat tersaji dengan baik karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Nordiawan, 2006)

Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menurut Wati (2014) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur untuk menyusun laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur pelaporan keuangan seperti pencatatan pengikhtisaran, pelaporan data dimana laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKP), manfaat dilakukannya sistem akuntansi keuangan daerah yaitu dapat menyelenggarakan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, yaitu oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiataannya serta pengguna dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pihak eksternal. (Marsdiasmo, 2008)

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).

Menurut pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebagai prosedur

pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak eksternal.

2.1.2.3 Mekanisme Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat digunakan sebagai kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi akuntansi tersebut maka dapat dijamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku. Salah satu tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pihak eksternal. (Ihsanti, 2014)

Menurut Mardiasmo (2004) dalam Ihsanti (2014) sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan relevan untuk pembuatan keputusan.

Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.2.4 Indikator Keberhasilan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2004) dalam Ihsanti, (2014) sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Permadi (2013) indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah :

- a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Karena sistem akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- b. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya. Prosedur Pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada

kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum

- c. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik. Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Sehingga, suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan

merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintah telah dipahami maka dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. (Wati dkk, 2014)

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan standar akuntansi pemerintah merupakan aturan dari pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mempunyai kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.1.3.2 Tujuan Dan Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar akuntansi pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

Melalui penerapan SAP dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Adhi dkk, 2013).

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan standar akuntansi pemerintah mempunyai dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintah adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik. (Rahayu, 2014)

Dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan hingga penyajian laporan keuangan pada entitas pemerintah.

2.1.3.3 Elemen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam penerapan standar akuntansi pemerintah ada berapa elemen yaitu :

a. Pengakuan

Menurut PP No 71 Tahun 2010, Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau

peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

c. Pelaporan

Menurut Bastian (2010) pelaporan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah pemakai, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya.

d. Pengungkapan

Pengungkapan menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan berhubungan dengan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan

bermanfaat selain apa yang dinyatakan melalui laporan keuangan (Winarno, 2006).

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Rahayu, dkk (2014) laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Menurut Lindawati (2015) kualitas laporan keuangan ialah informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dan bisa digunakan pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan, sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pemegang amanat ke pemberi amanat.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.(Yosefrandi, 2008)

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

2.1.4.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memenuhi unsur :

- a. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki karakteristik :

- i. Memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.

ii. Memberikan manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.

iii. Disajikan tepat waktu (*timeliness*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

iv. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

- b. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan menyajikan secara fakta jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

i. penyajian jujur (*faithfulness of presentation*)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.

ii. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit independen.

iii. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak bersifat bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

c. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan dengan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat

dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

- d. Dapat dipahami dengan oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan dan didalamnya mengandung informasi keuangan berkualitas yang memenuhi karakteristik relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah
- c. Mengenai informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi

- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Dalam PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sehingga dapat disimpulkan tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.4.4 Komponen – Komponen Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan saldo anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan perubahan ekuitas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul	Hasil
1	Andini, Dewi dan Yusrawati (2015) Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 24 No 1	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kab. Empat Lawang	<u>Secara parsial:</u> Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Jadi untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula <u>Secara simultan:</u> Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2	Wati Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2 Nomor 1	Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	<u>Secara parsial:</u> Dapat ditarik kesimpulan : kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan daerah <u>Secara simultan:</u>

			Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3	Nurillah, Assyifa dan Dulmuid (2014) Jurnal of accounting Vol 1 Nomor 1	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD kota Depok)	kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
4	Rahayu liza, Kennedy, Yuneita Anisma (2014) Jom Fekon Vol 2 Nomor 2	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah provinsi riau (studi empiris pada SKPD provinsi Riau)	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan daerah
5	Setyawan, Alfis Endra (2015)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (studi empiris pada SKPD Ponorogo)	Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Sumber : Data diolah dari berbagai jurnal

2.3 Kerangka berfikir

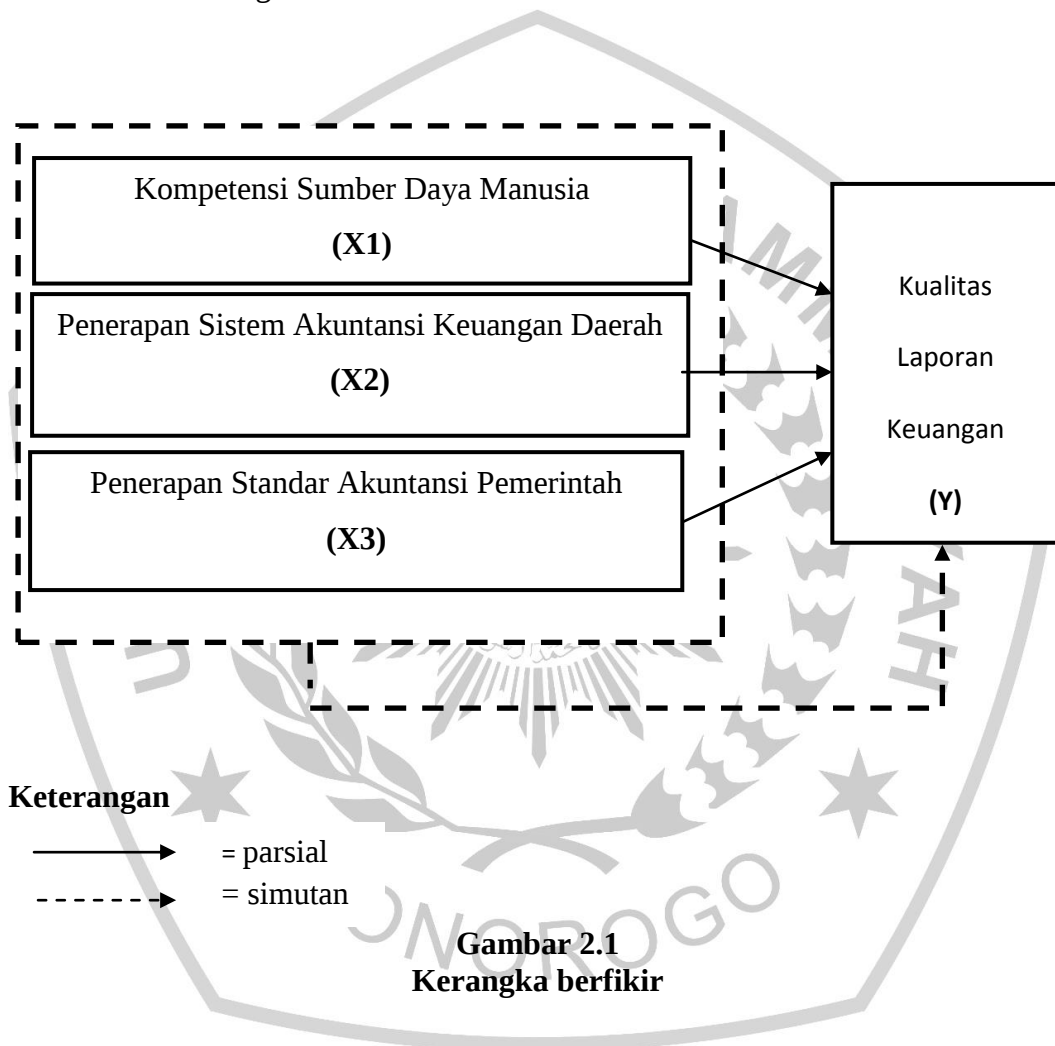
Berdasarkan teori dan peneliti yang telah dikemukakan, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. Menurut Rahayu, dkk (2014) Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Selain itu hal yang mendasar dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Marsdiasmo (2008) menyatakan tujuan sistem akuntansi keuangan daerah ialah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pihak eksternal. Menurut penelitian Wati, dkk (2014) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Penerapan standar akuntansi pemerintah juga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Seperti penelitian yang dilakukan Wati, dkk (2014) penerapan SAP berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik penerapan SAP maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan. Begitu pula

penelitian yang dilakukan oleh Jannaini dan Kusumah (2012) dalam Wati (2014) dimana penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan (Santoso, 2015: 28).

a. **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Rahayu, dkk (2014) Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan yang berkualitas dan bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Menurut Wati, dkk (2014) dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Untuk menghasilkan laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan diperlukan kompetensi sumber daya manusia untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan, sehingga dengan adanya

kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji dan pengertian yang menyesatkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk (2014) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Roviyantje (2011) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga dengan demikian hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H01 = kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Ha1 = kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemendagri No.13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan menyediakan

informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pihak eksternal. (Mardiasmo, 2008)

Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan adanya perlakuan akuntansi akuntansi tersebut maka akan dapat dijamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat digunakan sebagai kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Tujuan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keterandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Selain menerapkan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah juga harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji dan material.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tutun hermawanto botuthie (2013) menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik

maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah atau sebaliknya. Dan menurut penelitian yang dilakukan Wati dkk, (2014) menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga dengan demikian hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H02 = Penerapan sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Ha2 = Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

c. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Wati, dkk (2014) mengemukakan standar akuntansi pemerintah merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan sehingga standar akuntansi pemerintah merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintah telah dipahami maka dapat

menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Suatu pemerintah yang menerapkan standar pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintah. Dengan standar akuntansi pemerintah yang diharapkan agar semuanya berjalan dengan tersruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkannya.

Menurut Jannaini dan kusumah (2012) dalam Wati, dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah selain itu penelitian terkait juga pernah dilakukan Sihombing (2011) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga dengan demikian hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H03 = Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Ha3 = Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

d. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan yang berkualitas dan bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk (2014) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk (2014) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak mengandung salah saji dan material. Menurut penelitian yang dilakukan Wati dkk, (2014) menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

standar akuntansi pemerintah merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan sehingga standar akuntansi pemerintah merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Jannaini dan kusumah (2012)

dalam Wati, dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H04 = kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi pemerintah, standar akuntansi pemerintah secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Ha4 = kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi pemerintah, standar akuntansi pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

